



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/033 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, digunakan untuk:

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2023

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan:

1. Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 050/033 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BAPPEDA KABUPTEN TEMANGGUNG**

Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
		3. Indeks Inovasi Daerah

Program

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu
			2. Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu
		2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pembangunan Manusia
			2. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			3. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
			4. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur
		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian
			2. Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang Disusun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Terfasilitasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
				Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun	Terkordinirnya Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Terkordinirnya Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK)

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	PD)
6.	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah yang Disusun	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
7.	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah yang Disusun	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
8.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang Diverifikasi	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
			Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang Diverifikasi	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
9.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Diverifikasi	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
10.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Diverifikasi	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infratsruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
11.	Tersusunnya Perencanaan Kebijakan di Bidang Peraturan Pemerintahan dan Kebijakan di Bidang Tata Kelola Peraturan Kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Disusun	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
				Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik
12.	Tersusunnya Perencanaan dan Pemanfaatan IPTEK Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Disusun	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
13.	Terlaksananya Pengembangan IPTEK melalui Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang Disusun	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008